

PENGUATAN SISTEM PENGAMANAN INTERNAL BALAI KOTA BOGOR MELALUI PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM MENCEGAH ANCAMAN TERORISME

Andityas Pranowo¹⁾, Asep Adang Supriyadi²⁾, I Gusti Ngurah Bagus Sucitra³⁾

¹Pascasarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara

Email: andityaspranowo@gmail.com

²Dosen Sekolah Tinggi Intelijen Negara

Email: aadangsupriyadi@gmail.com

³Dosen Sekolah Tinggi Intelijen Negara

Email: ignsucitra@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk membahas penguatan sistem pengamanan internal Balai Kota Bogor melalui pembinaan wawasan kebangsaan dalam mencegah ancaman terorisme. Kota Bogor sebagai penyangga Jakarta masuk dalam ring satu pengamanan VIP karena berada dekat dengan Istana Bogor. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, secara fisik, penguatan Sistem Pengamanan Internal Kantor Balai Kota Bogor dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini; *Increase the Risks, Increase the Effort, Reduce the Rewards, Remove Excuses, dan Reduce Provocations*. Kedua, upaya penguatan Sistem Pengamanan Internal Kantor Balai Kota Bogor Melalui Pembinaan Wawasan Kebangsaan Para Karyawan, pembinaan wawasan kebangsaan para karyawan Balai Kota Bogor bertujuan untuk membantu mereka menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan, seperti cinta tanah air, kesadaran akan pentingnya keamanan negara, dan semangat persatuan dan kesatuan. pembinaan tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan mereka terhadap tanda-tanda dan perilaku mencurigakan di sekitar mereka.

Kata Kunci: Sistem Pengamanan; Kantor Balai Kota; Ancaman; Terorisme.

ABSTRACT

This journal aims to discuss the security system for the Bogor City Hall office in dealing with the threat of criminal acts of terrorism. The city of Bogor as a buffer for Jakarta is included in the VIP security ring because it is close to the Bogor Palace. This research method uses qualitative research with a descriptive analysis design. The results of this study conclude that First, physically, strengthening the Internal Security System for the Bogor City Hall Office can be carried out with the following steps; *Increase the Risks, Increase the Effort, Reduce the Rewards, Remove Excuses, and Reduce Provocations*. Second, efforts to strengthen the Internal Security System for the Bogor City Hall Office through Fostering the National Insight of Employees, fostering national insight for Bogor City Hall employees aims to help them internalize national values, such as love for the motherland, awareness of the importance of national security, and a spirit of unity and unity. Such coaching can help increase their awareness and alertness to suspicious signs and behavior around them.

Keywords: Security System, City Hall Office, Threats, Terrorism

PENDAHULUAN

Ancaman terorisme merupakan salah satu masalah keamanan yang signifikan di dunia saat ini, termasuk di Indonesia. Pemerintah dan berbagai instansi publik, termasuk Balai Kota Bogor, bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keselamatan warga serta

melindungi fasilitas pemerintah. Dalam upaya memperkuat sistem pengamanan internal Balai Kota Bogor, penting untuk memperhatikan peran karyawan sebagai salah satu elemen kunci dalam pencegahan tindak pidana terorisme.

Para karyawan Balai Kota Bogor memiliki akses ke area penting dan

informasi rahasia yang harus dilindungi dengan baik. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan mengenai ancaman terorisme serta pentingnya wawasan kebangsaan adalah langkah yang krusial dalam memperkuat sistem pengamanan internal kantor tersebut. Dengan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, para karyawan dapat menjadi mitra yang aktif dalam upaya pencegahan terorisme dan melaporkan potensi ancaman yang mereka temui.

Pembinaan wawasan kebangsaan kepada para karyawan Balai Kota Bogor tidak hanya akan meningkatkan pemahaman mereka tentang ideologi negara dan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga akan membantu mengembangkan sikap kritis terhadap radikalisme dan ekstremisme. Hal ini dapat memberikan dasar yang kokoh bagi karyawan untuk mengidentifikasi tanda-tanda perilaku yang mencurigakan dan melaporkannya kepada pihak berwenang.

Selain itu, pembinaan wawasan kebangsaan juga dapat memperkuat solidaritas dan semangat kebersamaan di antara karyawan. Dengan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya keamanan dan mencegah ancaman terorisme, karyawan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan Balai Kota Bogor. Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara karyawan dan petugas keamanan akan meningkatkan efektivitas sistem pengamanan internal.

Merujuk Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Pasal 1 menyebutkan bahwa;

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana

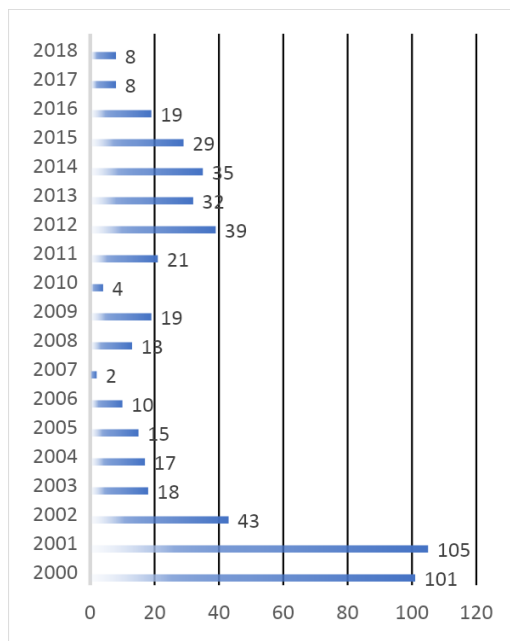
teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

Aksi terorisme yang pernah terjadi di tanah air adalah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), aksi terorisme tidak hanya membahayakan manusia, akan tetapi dapat menjadi ancaman bagi ideologi nasional, nilai kemanusiaan, kedaulatan negara, keamanan negara dan beragam aspek kehidupan lainnya. Kelompok terorisme memiliki jaringan yang cukup luas dan memiliki target tertentu sehingga penanggulangannya memerlukan pendekatan khusus, komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan.

Catatan serangan aksi terorisme yang paling mematikan di tanah air yaitu tragedi Bom Bali 1 dan 2, peristiwa tersebut memakan banyak korban jiwa dan merugikan baik secara materiil maupun nonmateriil. Jumlah aksi terorisme di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan angka fluktuasi, meskipun begitu Indonesia harus tetap waspada karena pergerakan terorisme tidak bisa diprediksi (*unpredictable*) dan tidak terlihat (*clandestine*).

Organisasi terorisme di Indonesia memiliki kaitan dengan gerakan kelompok DI (Darul Islam) atau NII (Negara Islam Indonesia) yang dipimpin oleh Imam Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo (Hakim, 2020). Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana organisasi-organisasi turunan atau pecahan DI/NII telah melakukan serangan teror yang cukup banyak di Indonesia, dari generasi kelompok baru tersebut yang paling banyak melakukan aksi teror adalah kelompok Jama'ah Islamiyah atau JI.

Grafik 1. Jumlah Aksi Terorisme di Indonesia dalam Dua Dekade Terakhir



Sumber: *Global Terrorism Database*, 2018

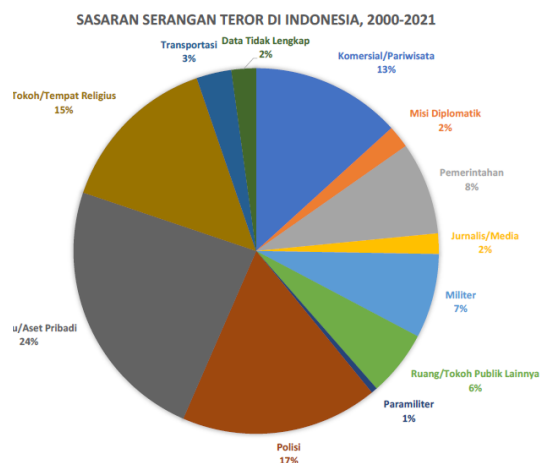
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam merespons permasalahan tersebut, salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian diamendemen pada tahun 2003, dan di amandemen kembali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 pada tahun 2018. Melalui Undang-Undang tersebut, strategi kontra terorisme di Indonesia dilaksanakan dengan melibatkan *stakeholder* dari berbagai unsur pemerintahan maupun unsur masyarakat, dari unsur pemerintah diantaranya yaitu BNPT, TNI, POLRI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan lain-lain.

Berbagai aksi teror di Indonesia dengan target sasaran yang cukup heterogen seperti serangan teror pada Pusat Keramaian, seperti Pusat Perbelanjaan, Hotel, Rumah Ibadah, Sekolah, Kantor Perwakilan Asing, dan lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai *leading sector* koordinasi dalam penanggulangan terorisme telah melaksanakan *mapping* terkait daerah yang rawan dari aksi terorisme seperti destinasi wisata, ibu kota negara, objek vital, kantor

polisi, kantor pemerintahan, dan lain-lain.

Strategi yang digunakan oleh kelompok teroris untuk melakukan aksinya juga beragam seperti bom mobil, bom bunuh diri, penembakan, bom buku, meracuni, dan aksi lainnya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa di masa mendatang, kelompok teroris menyerang dengan metode yang belum diperkirakan sebelumnya. Pola serangan teror di Indonesia, menurut lembaga kajian Lab45 mengemukakan bahwa selama ini aksi teror banyak berupa aksi-aksi pengeboman. Terdapat tiga target utama aksi terorisme, yaitu (1) tempat keagamaan/tokoh, (2) aparat keamanan (TNI dan Polri), (3) individu/aset pribadi, adapun pemerintahan sebanyak 8% dari sisi sasaran serangan teror. Berdasarkan data serangan teror di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2021, menunjukkan bahwa kelompok teroris menargetkan empat sasaran utama, yaitu individu, tempat ibadah, fasilitas pariwisata dan aparat kepolisian (Widjajanto, 2021).

Grafik 2. Sasaran Serangan Teror di Indonesia 2000-2021



Serangan Terorisme dapat terjadi kapan pun dan dimanapun (*unpredictable*). Para pelaku teror bisa jadi adalah bagian terdekat dari sebuah organisasi ataupun bagian dari lingkungan kerja sendiri (*insider threat*) yang setiap saat ada dan bersama kita, tidak menutup kemungkinan

ancaman dan serangan terorisme terhadap kantor pemerintah sebagai bentuk representasi dari negara yang ada di daerah. Oleh karena itu, pengelola kantor pemerintahan seperti kantor pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus selalu menyiapkan langkah-langkah strategis dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi ancaman terorisme yang dapat terjadi di lingkungannya. Lingkungan Kantor Pemerintahan merupakan salah satu fasilitas pemerintahan yang berfungsi dan bertugas sebagai pusat pelayanan publik, dimana kehadirannya memiliki potensi ancaman tindak pidana aksi terorisme dari luar maupun ancaman dari dalam.

Hal ini dimungkinkan terjadi karena kantor pemerintahan menghadapi ancaman terorisme yang datang dari luar (*external threat*) maupun yang datang dari dalam (*internal threat*), kasus tersebut antara lain seperti pelemparan bom molotov di Kantor Bupati Ketapang, Kalimantan Barat oleh oknum ASN berinisial AR (45), pada 25 Januari 2022. Aksi serangan Bom jenis Molotov bersamaan dengan agenda prosesi pengambilan sumpah jabatan eselon III, kemudian penangkapan oknum Pegawai Negeri Sipil berinisial TO (30) yang ditangkap Densus 88 AT di Tangerang, Banten. Tersangka merupakan bagian kelompok Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Tangerang dan ditangkap pada Maret 2022.

Berdasarkan data hasil penelitian Indeks Risiko Terorisme di Indonesia Tahun 2021 yang dilakukan terhadap 151 kota/kabupaten di Indonesia diketahui bahwa beberapa kota di Provinsi Jawa Barat berada pada rangking yang cukup tinggi (BNPT, 2021). Misalnya Kota Bandung berada pada rangking ke-5 tertinggi dalam dimensi target Risiko Terorisme. Sedangkan, kota Bogor, dalam dimensi target, berada di urutan 29 dengan nilai indeks 56.37 % Risiko Terorisme. Adapun Kota Tasikmalaya dan Kota Depok masing-masing berada pada rangking ke-7 dan ke-9

tertinggi dalam dimensi *supply* pelaku. Selain itu, Kantor Pemerintahan juga merupakan ikon negara yang menjadi dasar perwujudan moral warga negara Indonesia. Potensi pencemaran ideologi dan intervensi terhadap arus kinerja pemerintah tentunya menjadi potensi ancaman terorisme yang harus selalu diwaspadai.

Kegiatan pengamanan saat ini sudah menjadi kebutuhan semua sektor kehidupan manusia terutama pengamanan terhadap sumber-sumber daya yang mendukung kegiatan dan kehidupan manusia secara langsung. Kebutuhan manusia yang paling utama adalah kebutuhan primer, kemudian diikuti dengan kebutuhan sekunder, dan untuk mendapatkan semua kebutuhan tersebut, tentu saja manusia membutuhkan rasa aman untuk melangsungkan kehidupannya. Rasa aman yang dilakukan itu, disebut dengan kegiatan pengamanan (Soegirman, 2014). Pengamanan adalah upaya dalam mengamankan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan aman. Ruang lingkup pengamanan yang luas meliputi pengamanan Gedung, instalasi, mesin, pekerja atau karyawan, dan pengamanan terhadap data atau informasi.

Penyusunan riset ini dilakukan di Kota Bogor, Kota Bogor sebagai penyangga Jakarta masuk dalam ring satu pengamanan VIP karena berada dekat dengan Istana Bogor. Pasca kejadian Bom di Solo, beberapa tahun yang lalu, Walikota Bogor menginstruksikan kepada bawahannya agar meningkatkan kewaspadaan. Terkait adanya informasi ancaman Bom di Balai Kota Jakarta pada Tahun 2016, prosedur pengamanan tetap seperti biasa, tetap waspada, eskalasi peningkatan pengamanan belum ada peningkatan, sehingga masih sebatas menjalankan kegiatan sehari-hari seperti biasa.

Ada dua teori yang digunakan untuk menganalisis persoalan Penelitian ini, yaitu; Pertama, Teori *Situational Crime Prevention*. *Situational Crime Prevention* atau pencegahan kejahatan situasional

merupakan salah satu dari bagian strategi pencegahan kejahatan. Clarke mendefinisikan pencegahan kejahatan situasional terdiri dari tahapan dalam meminimalisir suatu kesempatan tindakan kejahatan yang meliputi; (1) jenis kejahatan bersifat khusus, (2) bagian dari manajemen dari kondisi lingkungan yang menjadi target sasaran kejahatan, (3) tindak kejahatan menjadi lebih sulit untuk direalisasikan dan besar kemungkinan untuk gagal jika dilakukan oleh pelaku kejahatan (Clarke R. V, 1997). Hal ini senada dengan pengertian bahwa *Situational Crime Prevention* (SCP) mencakup pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi kesempatan bagi orang untuk melakukan kejahatan, meningkatkan risiko dan untuk meminimalkan keuntungannya (International Centre for The Prevention of Crime & UNDC, 2010).

Awal konsep ini dikaji pada tahun 1980-an oleh Ronald V. Clarke. *Situational Crime Prevention* dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai macam rutinitas, pola, dan faktor yang berpengaruh terhadap aktivitas seseorang dalam melakukan kejahatan. *Situational Crime Prevention* bertujuan untuk mengurangi kesempatan pada bentuk kejahatan yang lebih khusus dengan meningkatkan risiko, kesulitan, dan mengurangi keuntungan yang akan di dapat (Clarke R. V, 1997). Tujuan dari SCP adalah untuk membuat suatu tindakan kejahatan kurang menarik dan kecil kemungkinannya untuk pelaku termotivasi dan pelaku menjadi berpikir ulang untuk melakukan aksinya atau disebut rasional. Berdasarkan fakta yang ada bahwa sebagian besar kejahatan terjadi pada waktu dan tempat tertentu, oleh karena itu fokus dari SCP itu sendiri pada penghapusan atau pengurangan kesempatan terjadinya suatu tindakan kejahatan pada waktu dan tempat tertentu (Scheider, 2015).

Clarke (1997) dalam pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional memperkenalkan tiga cabang pendekatan

untuk mengintervensi calon pelaku agar tidak melakukan tindakan kejahatan. Ketiga cabang tersebut yaitu: *surveillance* (pengawasan), *target hardening* (penguatan target), dan *environmental management* (manajemen lingkungan). *Surveillance* atau pengawasan terbagi menjadi tiga konsep yaitu *natural surveillance* (pengawasan alamiah), *formal surveillance* (pengawasan formal), dan *surveillance by employees* (pengawasan oleh petugas). *Target Hardening* atau penguatan target meliputi intervensi yang menguatkan target dan juga untuk melemahkan calon pelaku seperti pemasangan kunci ganda, lemari besi, kaca anti pecah, dan alat-alat pendukung keamanan lainnya. *Environmental management* atau manajemen lingkungan merujuk pada pengambilan tindakan yang dapat mengurangi risiko kejahatan di suatu lingkungan (Cornish & Clarke, 2003).

Kedua, teori internalisasi nilai. Teori internalisasi nilai dikemukakan oleh Bandura pada tahun 1977. Albert Bandura dikenal dengan kontribusinya yang besar dalam teori pembelajaran sosial, yang menekankan pentingnya peran pemodelan dan pengaruh sosial dalam pembentukan perilaku individu. Dalam teori pembelajaran sosialnya mengemukakan bahwa individu belajar melalui proses pengamatan dan peniruan terhadap perilaku orang lain (Bandura, A., & Walters, R. H., 1977). Pada dasarnya, ketika individu menyaksikan perilaku yang dihargai atau dipertimbangkan penting oleh masyarakat atau lingkungan sosialnya, mereka cenderung untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut dan mengadopsinya sebagai pandangan dan perilaku mereka sendiri.

Penelitian ini mengacu pada serangkaian penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pengamanan kantor Balai Kota Bogor. Para peneliti sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek keamanan dan strategi pencegahan terorisme yang dapat memberikan wawasan berharga, seperti penelitian Dinata (2013), Freilich, Mandala, dan Gruenewald (2018), Özer

dan Akbaş (2011), Firmansyah dan Puspitasari (2021), Anugrah, Sumantri, dan Suwarno (2019), Utomo, Wijayanto, Yusfan, Wardani, Poniman, Supriyadi, dan Arief (2021), Supriyadi dan Manessa (2020), Purwasih, G. D. (2023), Sinaga, Y. T. (2021), Suyanto, B. (2020), Bribin, M. (2021), Hanipah, R., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2022), Widisuseno, I., & Sudarsih, S. (2019), Budiman, A., Nurholis, E., & Erlina, T. (2020), Purwasih, G. D. (2023), Rulyansah, A., Wardana, L. A., & Sari, I. N. (2018), Rizky, L. (2018), Sadiyah, D. (2018). Strategi dakwah, Saddhono, K., Setiawan, B., Rohmadi, M., Rakhmawati, A., Suhita, R., & Hastuti, S. (2022), Muhamad, Y. M., Al Muchtar, S., & Anggraeni, L. (2021), Adiwilaga, R., & Kurniawan, A. (2021), Dini, J. P. A. U. (2022), Lubis, D., & Siregar, H. S. (2020), dan Restiana, V. L., Susila, A., & Rofieq, A. (2021). Penelitian ini memanfaatkan temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus pada pencegahan terorisme berbagai dari berbagai aspek yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan pemahaman tentang sistem pengamanan di Kantor Balai Kota Bogor. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan yaitu sudut pandang pencegahan terorisme dari aspek sistem keamanan internal dan peningkatan wawasan kebangsaan dalam rangka pencegahan aksi terorisme di lingkungan Balai Kota Bogor.

Berdasarkan uraian di atas, maka jurnal ini bertujuan untuk membahas penguatan sistem pengamanan internal Balai Kota Bogor melalui pembinaan wawasan kebangsaan dalam mencegah ancaman terorisme.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik wawancara dan studi dokumen dalam mengumpulkan data-data penelitian yang berkaitan dengan konteks penguatan sistem pengamanan internal Balai Kota Bogor melalui pembinaan wawasan kebangsaan

dalam mencegah ancaman terorisme. Metode analisis digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dengan model interaktif dan berkelanjutan hingga tuntas, sehingga datanya jenuh (Miles, Matthew. B, dan A. Michael Huberman, 2014). Adapun yang dimaksud dengan kejenuhan data ialah kondisi di mana tidak dimungkinkannya mendapatkan data baru atau tidak adanya lagi data atau informasi yang baru. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dan berkelanjutan menurut Miles dan Huberman meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). *Data Condensation* dilaksanakan dengan cara merangkum, menentukan hal-hal pokok yang dianggap penting. Data terkait Sistem Pengamanan Kantor Balai Kota Bogor Dalam Menghadapi Ancaman Tindak Pidana Terorisme direduksi sehingga menunjukkan gambaran secara lengkap dan relevan dalam melakukan tahapan berikutnya. *Data Display* dalam penelitian kualitatif biasanya berupa narasi atau teks. *Data display* dilaksanakan dengan beragam cara, misalnya uraian dalam bentuk narasi, *flowchart/bagan*, korelasi antar data, atau diagram. *Conclusions* atau penarikan kesimpulan merupakan sebuah temuan dari hasil penelitian atau sesuatu yang belum pernah ditemukan oleh riset sebelumnya. Temuan baru tersebut dapat berupa penelitian atau deskripsi suatu penelitian yang sebelumnya masih bias dan hasil risetnya dapat memperjelas obyek penelitian tersebut. Penelitian atau temuan tersebut dapat berupa klausa interaktif, klausa sebab akibat, teori, atau hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penguatan Sistem Pengamanan Internal Kantor Balai Kota Bogor.

Secara keseluruhan, teori pencegahan kejahatan situasional Clarke menekankan pentingnya mengubah lingkungan fisik dan sosial di mana kejahatan terjadi untuk

mengurangi peluang perilaku kriminal. Dengan menerapkan strategi ini, adalah mungkin untuk mengurangi kejahatan dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan terjamin. Jika dihadapkan pada Sistem pengamanan di Kantor Balai Kota Bogor dalam menghadapi ancaman tindak pidana terorisme, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1) Meningkatkan risiko tertangkapnya pelaku kejahatan (*Increase the Risks*).

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan dapat diketahui bahwa sistem pengamanan di Kantor Balai Kota Bogor dinilai cukup lemah, oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki sistem pengamanan tersebut maka perlu melakukan beberapa upaya berikut; (1) menambah kamera keamanan di semua titik masuk dan keluar ke kantor. (2) Terapkan tindakan kontrol akses seperti persyaratan masuk pengunjung. (3) Meningkatkan frekuensi patroli keamanan di dalam dan sekitar kantor. (4) Melakukan pemeriksaan latar belakang pada semua karyawan yang memiliki akses ke area-area sensitif atau vital di lingkungan kantor Balai Kota Bogor. (5) Pasang pembatas seperti *bollard dan planter* untuk mencegah kendaraan memasuki perimeter kantor. (6) Menerapkan sistem pengawasan seperti CCTV dan kamera pengenalan nomor untuk memantau aktivitas di sekitar kantor. (7) Melakukan pemeriksaan latar belakang dan pemeriksaan pada semua tamu yang berkunjung ke kantor. (8) Buat zona penyangga antara bangunan dan jalan, di mana kendaraan tidak boleh parkir atau menganggur. (9) Terapkan sistem komunikasi darurat yang dapat digunakan untuk memperingatkan semua penghuni jika terjadi serangan teroris. (10) Pasang sistem alamat publik di seluruh gedung untuk memberikan petunjuk selama keadaan darurat. (11) Kembangkan rencana evakuasi yang ditinjau dan diperbarui secara berkala. (12) Lakukan pelatihan rutin untuk semua penghuni

tentang rencana evakuasi. (13) Pasang lampu darurat dan rambu keluar untuk membantu evakuasi.

2) Meningkatkan kesulitan untuk melakukan kejahatan (*Increase the Effort*).

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan dapat diketahui bahwa sistem pengamanan di Kantor Balai Kota Bogor dinilai cukup lemah, oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki sistem pengamanan tersebut maka perlu melakukan beberapa upaya berikut; (1) instalasi pintu dan jendela pada area kantor Balai Kota terutama yang berhubungan dengan area Walikota atau wakil Walikota serta tempat-tempat yang dinilai strategis seperti tempat penyimpanan dokumen penting sehingga sulit dibobol atau dilewati dan Pasang pintu dan jendela keamanan yang tahan ledakan dan anti peluru. (2) Terapkan kebijakan tertib dan disiplin yang mengharuskan karyawan mengunci informasi sensitif saat tidak digunakan. (3) Gunakan pengamanan teknologi keamanan lainnya untuk melindungi informasi sensitif pada perangkat digital. (4) Kembangkan rencana respons yang menguraikan peran dan tanggung jawab semua staf jika terjadi serangan teroris. (5) Lakukan pelatihan rutin untuk semua staf tentang rencana respons. (6) Lakukan latihan rutin untuk memastikan bahwa semua staf memahami rencana tersebut dan dapat melaksanakannya secara efektif.

3) Memahami imbalan dari setiap kejahatan kemudian menemukan cara untuk mengurangi atau menghilangkannya (*Reduce the Rewards*).

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan dapat diketahui bahwa sistem pengamanan di Kantor Balai Kota Bogor dinilai cukup lemah, oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki sistem pengamanan tersebut maka perlu melakukan beberapa upaya berikut; (1) Batasi akses ke informasi sensitif hanya untuk karyawan yang memerlukannya untuk melakukan tugas pekerjaan mereka.

(2) Terapkan pemantauan untuk mendeteksi dan mencegah akses tidak sah ke informasi sensitif. (3) Lakukan pelatihan kesadaran keamanan secara teratur untuk semua karyawan untuk menyoroti pentingnya melindungi informasi sensitif.

4) Menghilangkan alasan pelaku potensial untuk melakukan kejahatan (*Remove Excuses*). Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan dapat diketahui bahwa sistem pengamanan di Kantor Balai Kota Bogor dinilai cukup lemah, oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki sistem pengamanan tersebut maka perlu melakukan beberapa upaya berikut; (1) Memberi karyawan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan tugas pekerjaan mereka tanpa menggunakan akses tidak sah ke informasi sensitif. (2) Terapkan sistem pelaporan yang memungkinkan karyawan melaporkan insiden keamanan tanpa takut akan pembalasan. (3) Menyediakan layanan konseling dan dukungan bagi karyawan yang mungkin mengalami stres atau masalah pribadi lainnya yang dapat menyebabkan pelanggaran keamanan. (4) Terapkan budaya keamanan di mana semua penghuni didorong untuk melaporkan aktivitas atau perilaku yang mencurigakan.

5) Mengurangi situasi provokasi yang dapat memicu atau menyebabkan terjadinya tindak kejahatan (*Reduce Provocations*). Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan dapat diketahui bahwa sistem pengamanan di Kantor Balai Kota Bogor dinilai cukup lemah, oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki sistem pengamanan tersebut maka perlu melakukan beberapa upaya berikut; (1) Melaksanakan program resolusi konflik untuk mengurangi ketegangan dan mencegah insiden kekerasan di tempat kerja. (2) Menyediakan karyawan dengan lingkungan kerja yang aman dan nyaman yang meminimalkan stres dan meningkatkan produktivitas. (3) Menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap intimidasi, pelecehan, atau diskriminasi di tempat kerja.

b. Penguatan Sistem Pengamanan Internal Kantor Balai Kota Bogor Melalui Pembinaan Wawasan Kebangsaan Para Karyawan. Analisis "Penguatan Sistem Pengamanan Internal Kantor Balai Kota Bogor Melalui Pembinaan Wawasan Kebangsaan Para Karyawan" dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang terkait. Berikut adalah beberapa poin yang bisa dipertimbangkan dalam analisis tersebut:

1) Internalisasi Nilai. Dalam teori internalisasi nilai, individu mengadopsi dan menginternalisasi nilai-nilai sosial dan moral dari lingkungan mereka. Dalam konteks ini, pembinaan wawasan kebangsaan para karyawan Balai Kota Bogor bertujuan untuk membantu mereka menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan, seperti cinta tanah air, kesadaran akan pentingnya keamanan negara, dan semangat persatuan dan kesatuan. Proses internalisasi nilai wawasan kebangsaan dalam konteks penelitian melibatkan berbagai tahap, yang pada gilirannya dapat memiliki dampak penting pada pembinaan wawasan kebangsaan dan sistem pengamanan. Proses internalisasi nilai wawasan kebangsaan antara lain sebagai berikut; **Pertama**, mengidentifikasi nilai-nilai kebangsaan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab karyawan dalam konteks keamanan. Ini mungkin termasuk kesetiaan kepada negara, semangat gotong royong, toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap kebhinekaan. **Kedua**, Pengenalan Nilai-nilai Kebangsaan. Karyawan diberikan pelatihan dan materi pendidikan yang mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan. Ini mungkin melibatkan pembelajaran sejarah, pemahaman tentang konstitusi, dan peningkatan kesadaran tentang peran mereka dalam menjaga keamanan negara. **Ketiga**, Refleksi. Karyawan diberikan kesempatan untuk merenungkan dan berdiskusi tentang implikasi nilai-nilai kebangsaan dalam pekerjaan mereka. Ini mendorong pemahaman mendalam dan kesadaran tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara.

2) Peran Pembinaan Wawasan Kebangsaan.

Analisis juga dapat mempertimbangkan peran yang dimainkan oleh pembinaan wawasan kebangsaan dalam penguatan sistem pengamanan internal. Dengan meningkatkan pemahaman karyawan tentang ancaman terorisme dan pentingnya peran mereka dalam mencegahnya, pembinaan tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan mereka terhadap tanda-tanda dan perilaku mencurigakan di sekitar mereka.

3) Peran Karyawan dalam Menghadapi

Ancaman Terorisme. Dalam analisis ini, penting untuk mengevaluasi bagaimana pembinaan wawasan kebangsaan dapat membantumenggerakkan karyawan Balai Kota Bogor untuk berperan aktif dalam pencegahan ancaman terorisme. Melalui pemahaman mereka tentang ancaman tersebut, karyawan dapat menjadi mata dan telinga tambahan yang dapat mengidentifikasi dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Selain itu, peran karyawan dalam menghadapi ancaman terorisme di lingkungan Balai Kota Bogor antara lain sebagai berikut: **Pertama**, Pendukung Sistem Keamanan. Karyawan adalah elemen penting dalam sistem keamanan. Mereka harus aktif mendukung, mengikuti, dan melaksanakan prosedur keamanan yang telah ditetapkan. **Kedua**, Pelapor Potensial Ancaman. Karyawan harus menjadi mata dan telinga yang waspada dan, jika melihat tanda-tanda potensial ancaman terorisme, harus melaporkannya kepada pihak yang berwenang. **Ketiga**, Pendukung Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan. Karyawan harus berpartisipasi dalam program pembinaan wawasan kebangsaan dan mendorong rekan-rekan mereka untuk ikut serta. **Keempat**, Pendukung Semangat Gotong Royong. Karyawan harus siap bekerja sama dalam upaya melindungi keamanan Balai Kota Bogor dan negara pada umumnya.

4) Penguatan Sistem Pengamanan Internal.

Pembinaan wawasan kebangsaan dapat

memperkuat sistem pengamanan internal dengan melibatkan karyawan sebagai mitra yang aktif dalam menjaga keamanan kantor. Analisis dapat mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk memperkuat sistem, seperti peningkatan pelatihan keamanan, pemeriksaan ketat pada akses dan identifikasi karyawan, serta peningkatan komunikasi dan koordinasi antara karyawan dan petugas keamanan.

5) Dampak Pembinaan Wawasan Kebangsaan.

Analisis juga perlu mempertimbangkan dampak dari pembinaan wawasan kebangsaan pada sikap dan perilaku karyawan. Bagaimana pembinaan tersebut mempengaruhi kesadaran mereka terhadap ancaman terorisme, kesiapan mereka dalam menghadapinya, dan kolaborasi mereka dalam memperkuat sistem pengamanan internal. Adapun dampak dari pembinaan wawasan kebangsaan adalah sebagai berikut; **Pertama**, meningkatkan Efektivitas Sistem Pengamanan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan dan peran mereka dalam keamanan, sistem pengamanan Balai Kota Bogor dapat menjadi lebih efektif dalam mencegah ancaman terorisme. **Kedua**, meningkatkan Kewaspadaan. Karyawan yang menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan akan lebih waspada terhadap tanda-tanda potensial dari ancaman terorisme dan lebih cenderung untuk melaporkannya. **Ketiga**, mengurangi potensi ancaman dari dalam. Pembinaan wawasan kebangsaan juga dapat membantu mengurangi potensi ancaman terorisme dari dalam organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui sejauh mana penguatan sistem pengamanan internal Kantor Balai Kota Bogor melalui pembinaan wawasan kebangsaan para karyawan berkontribusi dalam mencegah ancaman tindak pidana terorisme dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis maka jurnal ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara fisik, penguatan Sistem Pengamanan Internal Kantor Balai Kota Bogor dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini; (1) Meningkatkan risiko tertangkapnya pelaku kejahatan (*Increase the Risks*) (2) Meningkatkan kesulitan untuk melakukan kejahatan (*Increase the Effort*) (3) Memahami imbalan dari setiap kejahatan kemudian menemukan cara untuk mengurangi atau menghilangkannya (*Reduce the Rewards*) (4) Menghilangkan alasan pelaku potensial untuk melakukan kejahatan (*Remove Excuses*) (5) Mengurangi situasi provokasi yang dapat memicu atau menyebabkan terjadinya tindak kejahatan (*Reduce Provocations*).
2. Upaya penguatan Sistem Pengamanan Internal Kantor Balai Kota Bogor Melalui Pembinaan Wawasan Kebangsaan Para Karyawan adalah sebagai berikut: (1) pembinaan wawasan kebangsaan para karyawan Balai Kota Bogor bertujuan untuk membantu mereka menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan, seperti cinta tanah air, kesadaran akan pentingnya keamanan negara, dan semangat persatuan dan kesatuan. (2) pembinaan tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan mereka terhadap tanda-tanda dan perilaku mencurigakan di sekitar mereka. (3) karyawan dapat menjadi mata dan telinga tambahan yang dapat mengidentifikasi dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada pihak berwenang. (4) pemeriksaan ketat pada akses dan identifikasi karyawan, serta peningkatan komunikasi dan koordinasi antara karyawan dan

petugas keamanan. (5) polapembinaan wawasan kebangsaan mempengaruhi kesadaran mereka terhadap ancaman terorisme, kesiapan mereka dalam menghadapinya, dan kolaborasi mereka dalam memperkuat sistem pengamanan internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R., & Kurniawan, A. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Kabupaten Bandung. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(1).
- Anugrah, P. T., Sumantri, S. H., & Suwarno, P. (2019). Strategi Lantamal II Padang Dalam Mengamankan Obyek Vital Nasional Di Wilayah Perairan Selatan Sumatera Barat, Studi Kasus Pelabuhan Teluk Bayur. *Keamanan Maritim*, 5(1).
- Bandura, A., & Walters, R. H. (1977). *Social learning theory* (Vol. 1). Prentice Hall: Englewood cliffs.
- Bribin, M. (2021). Pendidikan Karakter Berbasis Agama Melawan Radikalisme. *Jurnal Gatranusantara*, 19(2), 212-202.
- Budiman, A., Nurholis, E., & Erlina, T. (2020). Pelatihan wawasan Kebangsaan Bagi Pertahanan Sipil (HANSIP) Di Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. *Abdimas Galuh*, 2(2), 181-185.
- Clarke, R.V. (1997). *Situational Crime Prevention*. Monsey, NY: Criminal Justice Press.
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (2003). Opportunities, Precipitators, and Criminal Decisions: A Reply to Wortley's Critique of *Situational Crime Prevention*. *Crime Prevention Studies*, Vol.16, 41-96.
- Dinata, R. O. (2013). Manajemen pengamanan obyek vital studi kasus PLTA Saguling.

- Dini, J. P. A. U. (2022). Penguatan Moderasi Beragama pada Anak Usia Dini sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(4), 2974-2984.
- Firmansyah, M. Z., & Puspitasari, P. (2021). Pemanfaatan Drone sebagai Bagian dari Kontra Terorisme: Tinjauan pada Regulasi dan Prosedur Tetap Pengamanan. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 43-58.
- Freilich, J. D., Mandala, M., & Gruenewald, J. (2018). *Situational Crime Prevention and Terrorism: An Assessment of 10 Years of Research*. Global Terrorism Database, 2018
- Hakim, Y. R. (2020). Radikalisasi Gaya Baru; Meninjau Kiprah Peace Generation Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme Di Indonesia, Jakarta: Daulat Press.
- Hanipah, R., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2022). Penguatan Karakter Cinta Tanah Air Melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan Abad 21. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 678-683.
- Indeks Risiko Terorisme di Indonesia Tahun 2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- International Centre for The Prevention of Crime & UNDC, 2010
- Lubis, D., & Siregar, H. S. (2020). Bahaya Radikalisme terhadap Moralitas Remaja melalui Teknologi Informasi (Media Sosial). *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 20(1), 21-34.
- Miles, Matthew.B, dan A. Michael. Huberman, (2014) Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Jakarta: UI Press.
- Muhamad, Y. M., Al Muchtar, S., & Anggraeni, L. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Internalisasi Nilai Toleransi Dalam Mencegah Potensi Radikalisme di Universitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(3), 1270-1279.
- Özer, M., & Akbaş, H. (2011). the Application of Situational Crime Prevention To Terrorism. *Pa.Edu.Tr*, 13(2), 179–194.
- Purwasih, G. D. (2023). Penguatan Wawasan Kebangsaan, Radikalisme, Remaja. *JIK-PkM: Jurnal Inovatif dan Kreatif hasil Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(2), 112-124.
- Purwasih, G. D. (2023). Penguatan Wawasan Kebangsaan, Radikalisme, Remaja. *JIK-PkM: Jurnal Inovatif dan Kreatif hasil Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(2), 112-124.
- Restiana, V. L., Susila, A., & Rofieq, A. (2021). Strategi Kebijakan Deradikalisasi Dalam Penanganan Radikalisme Pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). *Kybernan: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 95-105.
- Rizky, L. (2018). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menanggulangi radikalisme di Indonesia (Studi atas program deradikalisasi pendekatan wawasan kebangsaan) (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- Rulyansah, A., Wardana, L. A., & Sari, I. N. (2018). Idealisasi Ideologi Pancasila untuk Pencegahan Radikalisme melalui Aktivitas Bela Negara pada PK2MABA Universitas Panca Marga. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 3(12), 1680-1687.
- Saddhono, K., Setiawan, B., Rohmadi, M., Rakhmawati, A., Suhita, R., & Hastuti, S. (2022). Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagai Upaya Mencegah Radikalisasi dan Menumbuhkan Cinta Tanah Air untuk Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Magelang. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(4), 111-122.
- Sadih, D. (2018). Strategi dakwah penanaman nilai-nilai Islam dalam

- menangkal paham radikalisme di kalangan mahasiswa. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 18(2).
- Scheider, S. (2015). *Crime Prevention: Theory and Practice*. CRC Press.
- Sinaga, Y. T. (2021). Komponen Cadangan sebagai Wujud Bela Negara dan Strategi dalam Menangkal Ancaman Radikalisme-Terrorisme di Indonesia. *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 1(2).
- Soegirman, (2012). *Intelijen Profesi Unik Orang-Orang Aneh*, Jakarta: Media Bangsa
- Supriyadi, A. A., & Manessa, M. D. M. (2020). Terrorism vulnerability assessment in Java Island: a spatial multi-criteria analysis approach. *The Indonesian Journal of Geography*, 52(2), 163-169.
- Suyanto, B. (2020). Strategi Pembinaan Mental Masyarakat Dalam Menghadapi Radikalisme. *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 9(2), 95-112.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Utomo, A. M., Wijayanto, G. N., Yusfan, M. A., Wardani, P., Poniman, A., Supriyadi, A. A., ... & Arief, S. (2021). Geospatial Intelligence Analysis to Support National Defense Interests. In 2021 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS) (pp. 1-8). IEEE.
- Widuseno, I., & Sudarsih, S. (2019). Penguatan Wawasan Kebangsaan Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikalisme Dan Intoleransi Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Salatiga Kotamadia Salatiga. *Harmoni: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 24-28.
- Widjajanto, A. Gindarsah, I., Tilik Data; Pola 552 Serangan Teror di Indonesia, 2021, www.lab45.id, diakses pada Oktober 2022.